

OPINI PUBLIK

AMAN Paser Dorong Isu Penyelamatan Hutan Adat Disekitar Kawasan IKN

Muhamad Ali - PASER.OPINIPUBLIK.ID

Oct 28, 2022 - 19:28



PASER - Perwakilan Masyarakat Adat Paser Kalimantan Timur yang tergabung dalam keanggotaan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) hadir Kongres ke VI AMAN di wilayah Tabi, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Pada Kongres yang dilaksanakan selama sepekan (dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2022) hadir Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Ketua Komnas HAM dan beberapa anggota DPR RI yang menjadi Ketua

Panja RUU Masyarakat Adat serta perwakilan Dirjen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Kongres yang mengangkat Tema Bersatu Pulihkan Kedaulatan Adat Untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia Yang Beragam & Tangguh Menghadapi Krisis. Juga hadir Gubernur Papua dan Papua Barat dalam pembukaan. Menyambut para undangan yang juga terdiri dari Bupati yang ada di Provinsi Papua serta beberapa Perwakilan Masyarakat Adat selaku peninjau Kongres yang berjalan.

M.Syahrul salah satu Peserta Peninjau kongres AMAN perwakilan masyarakat Adat Paser, yang berhasil awak media wawancarai Jum'at (28/10/2022) menyampaikan salah satu agenda yang di usung dalam kongres.

"Salah satu agenda yang Kami dorong adalah untuk dapat terus membangun kesetaraan hak-hak masyarakat adat Paser atas potensi-potensi dampak langsung dan tidak langsung dari pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang kini dibangun di wilayah Kaltim, khususnya Penajam Paser Utara" tutur Sahrul.

"Sebenarnya dalam kongres ada beberapa tema yang Kami dorong terkait isu-isu IKN, antaranya ialah terkait Pemetaan Wilayah Adat dikawasan Nusantara agar bisa memperkuat pengakuan dan perlindungan kesejahteraan hidup Masyarakat Adat yang ada di Kawasan IKN." Ungkap Syahrul

Menurut Sahrul, pihaknya sengaja memaparkan perkembangan pemetaan dan registrasi wilayah adat agar ada status pengakuan wilayah adat. Disamping upaya mewujudkan kedaulatan wilayah dan hutan adat melalui kebijakan-kebijakan Perda sebagai implementasi dari Putusan MK No.35 tahun 2012.

"Kami juga mendiskusikan strategi dan sinkronisasi percepatan pemetaan partisipatif dan registrasi wilayah adat untuk memperkuat gerakan perlindungan wilayah adat seluruh nusantara, khususnya juga untuk masyarakat adat yang saat ini berhadapan dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Baru." Kata Syahrul menjelaskan. (*Hendra*).